

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Perubahan 3 Penataan Organisasi



Disampaikan oleh:

Aulia Sofyan

Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan

Rencana Aksi Tahun 2021

[illegible]

1

Assessment organisasi berbasis kinerja

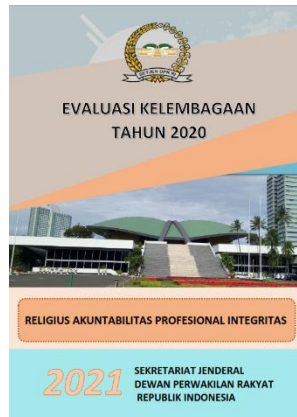
Monitoring dan Evaluasi organisasi
sesuai dengan Permenpan RB No 20
Tahun 2018

Kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena pada tahun 2021
terdapat penetapan struktur organisasi Sekretariat Jenderal
DPR RI yang baru (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021)



Tahun 2018

Nilai 72,87
(peringkat
komposit 4)



Tahun 2020

Nilai 74,92
(peringkat
komposit 4)



2

Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesment

Kajian Penyederhanaan Birokrasi

Penyusunan kajian telah dilaksanakan dan telah dilaksanakan pembahasan di tingkat eselon I pada tanggal 15 November 2021. Sebagai tindak lanjut atas rapat dimaksud selanjutnya akan dipersiapkan surat usulan penyederhanaan birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



3

Membentuk Struktur Organisasi yang Tepat Fungsi

Penyusunan usulan Penyederhanaan Birokrasi



Realisasi

Penyusunan Surat
Permintaan
Penambahan Waktu
Penyusunan Usulan
Penyederhanaan
Birokrasi sampai
mendapat arahan
Pimpinan DPR RI

3.1

3.2



Revisi Persekjen terkait Organisasi dan Tata Kerja

Realisasi

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi MenpanRB

2

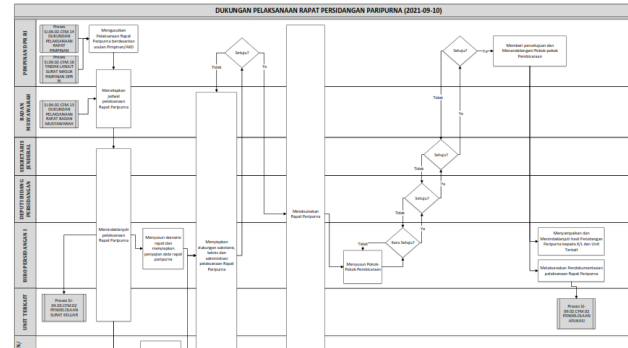
1

Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai dengan struktur baru dan menyesuaikan SOP dengan peta proses bisnis terbaru



1.1

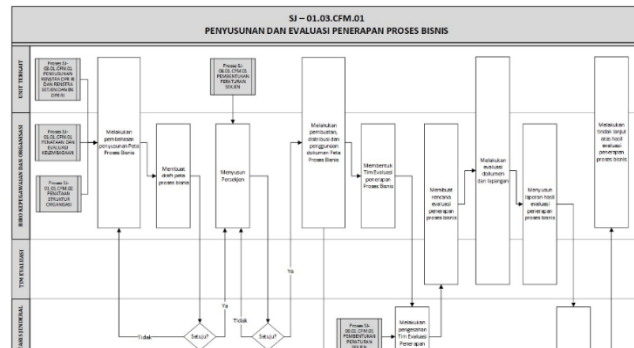
Penyusunan 22 peta lintas fungsi baru sebagai hasil evaluasi atas peta proses bisnis yang disusun tahun 2020



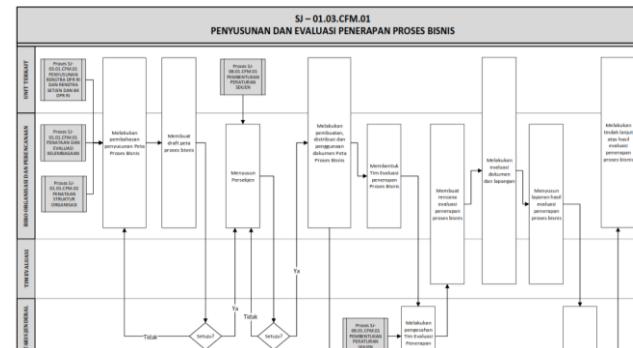
1.2

Penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi Setjen DPR RI yang baru

Before



After



Menyelesaikan penyederhanaan birokrasi dan menyusun mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional

Penyusunan kajian telah dilaksanakan dan telah dilaksanakan pembahasan di tingkat eselon I pada tanggal 15 November 2021. Sebagai tindak lanjut atas rapat dimaksud selanjutnya akan dipersiapkan surat usulan penyederhanaan birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

TINDAK LANJUT RAPAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI SELASA, 29 JUNI 2021

Telah dilakukan pengiriman surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor SJ/08196/SETJEN DPR RI/KP/03/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Penyederhanaan Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang isinya bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI meminta diberikan tambahan waktu guna terlebih dahulu mendapatkan arahan/persetujuan Pimpinan DPR RI atas konsep kajian penyederhanaan Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.



Progress Reform yang telah Dilakukan



2

Evaluasi Kelembagaan

Kegiatan ini tidak dilaksanakan, karena pada tahun 2021 terdapat penetapan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021)

1

Penyederhanaan Organisasi

Peta probis yang ideal dalam rangka penyederhanaan birokrasi

